

**SKRIPSI**

**PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN  
MINUMAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) SEBAGAI BENTUK  
PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KAWASAN GOR  
H. AGUS SALIM PADANG**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Dalam Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)**

**Pembimbing :**

**Hj. Ulfanora, S.H., M.H.  
Upita Anggunsuri, S.H., M.H.**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2025**

**No.Reg : 14/PK-II/III/2025**

## ABSTRAK

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan produsen makanan dan minuman yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat. Namun sayangnya, banyak ditemukan PKL yang tidak memiliki sertifikasi halal. Padahal salah satu upaya negara dalam melindungi hak-hak konsumen adalah memastikan produk makanan dan minuman yang mudah dijangkau oleh masyarakat terjamin kehalalannya. Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dengan demikian, penelitian ini akan berfokus pada dua pokok permasalahan. Pertama, bagaimana penerapan dari sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan GOR H. Agus Salim Padang? Kedua, bagaimana peran pengawasan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Padang terhadap produk makanan dan minuman yang telah memiliki sertifikasi halal dalam menjamin perlindungan terhadap konsumen? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen, wawancara dan observasi, serta metode analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua Pedagang Kaki Lima (PKL) makanan dan minuman di Kota Padang khususnya di Kawasan GOR H. Agus Salim memiliki sertifikasi halal terhadap produk yang mereka pasarkan. Hal ini disebabkan oleh pedagang tidak mengetahui terkait dengan kebijakan sertifikasi halal yang diterapkan oleh pemerintah dikarenakan belum maksimalnya pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh BPJPH. Selain itu, pengawasan dari BPJPH padang terhadap produk makanan dan minuman yang telah bersertifikat halal masih belum terlaksana secara optimal, terutama dalam hal pembinaan berkelanjutan serta evaluasi pasca-sertifikasi. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sistem pengawasan halal yang tidak hanya berfungsi sebagai kontrol administratif, tetapi juga menjadi upaya aktif dalam menjaga konsistensi kehalalan produk demi menjamin perlindungan hak-hak konsumen.

**Kata Kunci:** Sertifikasi Halal, Pedagang Kaki Lima, Produk Makanan dan Minuman

